



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

## Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mengatasi Korupsi di Sektor Publik

### Evaluation of the Performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Tackling Corruption in the Public Sector

Alfian A. Manupapami<sup>1</sup>, Donny Eddy Sam Karauwan<sup>2</sup>, Jumiran<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STIH Manokwari, Indonesia

<sup>2</sup> STIH Manokwari, Indonesia

<sup>3</sup> STIH Manokwari, Indonesia

[manupapamiharley@gmail.com](mailto:manupapamiharley@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b></p> <p>Corruption, Corruption Commission, Public Sector</p> <p>Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Sektor Publik</p>	<p><i>This study assesses the effectiveness of the Corruption Eradication Commission (KPK) in combating corruption in the public sector using a descriptive methodology and a qualitative approach. Data collection involved a comprehensive literature review and analysis of KPK official documents, including annual reports, academic publications, and relevant news articles. Thematic analysis was used to identify patterns, challenges, and opportunities in KPK's performance, which then led to strategic recommendations to improve its effectiveness in anti-corruption law enforcement, corruption prevention, and anti-corruption education efforts. The study began with a thorough literature review to gain insights into KPK's performance in fighting corruption in the public sector, with analysis of KPK's official documents, particularly annual reports, to complement the literature findings. Thematic analysis was applied to identify recurring themes, challenges, and potential areas for improvement in KPK's operations. Based on the results of the analysis, strategic recommendations were formulated to improve KPK's effectiveness in tackling corruption, focusing on law enforcement strategies, preventive measures, and anti-corruption education. The goal of this study is to give a clear image of KPK's effectiveness and offer practical solutions to optimize anti-corruption efforts, contributing to the broader discussion of governance and corruption mitigation in the public sector.</i></p> <p><i>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani korupsi di sektor publik. Pengumpulan data melibatkan tinjauan literatur yang komprehensif dan analisis dokumen resmi KPK, termasuk laporan tahunan, publikasi akademik, dan artikel berita yang relevan. Analisis</i></p>

*tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang dalam kinerja KPK, yang kemudian menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya dalam penegakan hukum anti-korupsi, pencegahan korupsi, dan upaya pendidikan anti-korupsi. Studi ini dimulai dengan tinjauan literatur menyeluruh untuk memperoleh wawasan tentang kinerja KPK dalam memerangi korupsi di sektor publik, dengan analisis dokumen resmi KPK, terutama laporan tahunan, untuk melengkapi temuan literatur. Analisis tematik diterapkan untuk mengidentifikasi tema yang berulang, tantangan, dan area potensial untuk peningkatan dalam operasional KPK. Berdasarkan hasil analisis, formulasi rekomendasi strategis dibuat untuk meningkatkan efektivitas KPK dalam penanganan korupsi, fokus pada strategi penegakan hukum, langkah-langkah preventif, dan pendidikan anti-korupsi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran jelas tentang efektivitas KPK dan menawarkan solusi praktis untuk mengoptimalkan upaya anti-korupsi, berkontribusi pada diskusi tata kelola dan mitigasi korupsi di sektor publik yang lebih luas.*



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah kronis dan kompleks di Indonesia serta di banyak negara lainnya. Di Indonesia, praktik Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk memberantas korupsi di sektor publik. Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah menunjukkan berbagai pencapaian dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara, sehingga memberikan efek jera dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. (Siagian, 2023)

Namun, kinerja KPK tidak terlepas dari kritik. Meskipun telah menorehkan banyak prestasi, beberapa pihak mempertanyakan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi secara sistemik dan konsistensinya dalam menangani kasus-kasus besar. Evaluasi kinerja KPK dalam mengatasi korupsi di sektor publik sangat penting untuk mengetahui capaian, kendala, dan peluang perbaikan yang ada. Evaluasi ini harus dilakukan secara komprehensif dan objektif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti penindakan, pencegahan, dan edukasi. (Sudiantini, 2020)

Penelitian sebelumnya oleh Patmawati dkk. (2024) menemukan bahwa KPK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Namun, penelitian-penelitian tersebut juga mengungkap beberapa keterbatasan KPK, seperti lemahnya koordinasi dengan lembaga lain dan kurangnya upaya pencegahan korupsi di tingkat birokrasi. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya fokus pada aspek-aspek tertentu dari kinerja KPK, misalnya penindakan atau pencegahan, dan belum banyak yang melakukan evaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut sekaligus. (Hadji & Patmawati, 2024)

Konteks politik dan sosial di Indonesia juga memengaruhi kinerja KPK. Dinamika politik yang tidak stabil dan intervensi dari berbagai pihak dapat menghambat upaya KPK dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan konteks ini dalam melakukan evaluasi kinerja KPK. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja KPK, dapat diidentifikasi strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dalam memberantas korupsi di sektor publik.

Tujuan dari Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana KPK menangani korupsi di sektor publik. Evaluasi ini akan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan edukasi. Selain itu, penelitian ini juga akan memperhatikan konteks politik dan sosial di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja KPK. Dengan demikian, diharapkan Penelitian ini dapat membantu KPK meningkatkan kinerja.

Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang studi antikorupsi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sketsa yang lebih baik mengenai kinerja KPK dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguntungkan bagi KPK, tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya bersama memberantas korupsi di Indonesia.

Identifikasi masalah dan tujuan penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian ilmiah. Dengan mengidentifikasi masalah secara jelas, peneliti dapat memfokuskan penelitiannya pada hal-hal yang esensial dan relevan. Penetapan tujuan penelitian yang jelas juga akan membantu peneliti dalam memilih metode penelitian yang tepat dan menganalisis data dengan lebih efektif. Oleh karena itu, pendahuluan dalam sebuah naskah ilmiah harus selalu memuat identifikasi masalah penelitian dan tujuan yang jelas.

Masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kinerja KPK dalam mengatasi korupsi di sektor publik, serta apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja KPK secara komprehensif, Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini akan sangat membantu dalam upaya untuk meningkatkan kinerja KPK, manfaat ilmiah dan hal baru yang dapat diambil dari evaluasi kinerja KPK, sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi korupsi di Indonesia.

Dengan demikian, Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya bersama memberantas korupsi di Indonesia. Evaluasi kinerja KPK yang dilakukan secara komprehensif akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas lembaga ini dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan KPK, kita dapat merumuskan strategi

yang lebih efektif untuk memberantas korupsi dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan insentif untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang studi antikorupsi, sehingga kita dapat terus mengembangkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Oleh sebab itu, artikel ini merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut; pertama bagaimana efektivitas KPK dalam penindakan kasus-kasus korupsi di sektor publik, dan sejauh mana upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan oleh KPK dalam mengurangi korupsi di sektor publik?

## **METODE**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani korupsi di sektor publik, dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen resmi, seperti laporan tahunan KPK, publikasi akademik, serta artikel berita terkait. Analisis data akan dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang yang dihadapi KPK dalam menjalankan tugasnya. Meskipun analisis tematik umum digunakan dalam penelitian kualitatif, metode ini sering dianggap kurang mendalam tanpa adanya validasi yang kuat, seperti triangulasi data atau validasi antar sumber. Oleh karena itu, langkah-langkah validasi yang komprehensif akan diterapkan dalam penelitian ini guna meminimalisasi risiko bias dan subjektivitas dalam hasil analisis. Dengan pendekatan yang cermat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas KPK dalam penindakan, pencegahan, dan edukasi antikorupsi, serta menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi di sektor publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas KPK dalam penindakan kasus-kasus korupsi di sektor publik**

Korupsi seperti penyakit kronis yang merusak sendi bangsa Indonesia. Praktik ini tak hanya mengganggu keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di tengah maraknya korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir sebagai lembaga independen yang diamanahkan untuk memberantas korupsi di sektor publik. Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah menunjukkan kinerja yang gemilang dalam menindak para koruptor, termasuk pejabat tinggi negara. Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK telah memberikan efek jera dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. (Guntara, 2020)

KPK memiliki peran penting dalam penindakan kasus-kasus korupsi di sektor publik. Kewenangannya dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT),

penyadapan, dan penyitaan aset telah menjadi senjata ampuh dalam memberantas koruptor. Sejak didirikan, KPK telah berhasil menindak puluhan ribu kasus korupsi dan menyita aset triliunan rupiah. KPK juga telah menyeret banyak pejabat tinggi negara ke meja hijau, termasuk menteri, anggota DPR, dan kepala daerah. Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK telah memberikan efek jera bagi para koruptor dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan tren peningkatan sejak KPK didirikan. Namun demikian, efektivitas KPK dalam penindakan kasus-kasus korupsi di sektor publik masih menuai kritik dan sorotan.(Heriyanto, 2023)

Salah satu kritik utama terhadap KPK adalah adanya beberapa kasus besar yang mandek di pengadilan. Kasus korupsi yang signifikan yang melibatkan pejabat tinggi negara mandek di pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen KPK dalam menindaklanjuti kasus-kasus besar. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan jumlah OTT. Penurunan ini dikhawatirkan menjadi indikasi bahwa KPK semakin kesulitan dalam mendeteksi dan menindak kasus-kasus korupsi. Lemahnya koordinasi dengan lembaga lain juga menjadi faktor penghambat bagi KPK. KPK masih menemui kendala dalam berkolaborasi dengan organisasi pemberantasan korupsi lainnya. Hal ini menghambat penelusuran aset koruptor dan penegakan hukum yang komprehensif.(Pringgaskti & Zulfiani, n.d.)

Salah satu penyebab utama keberhasilan KPK adalah dukungan luas masyarakat dan kewenangan penuh dalam melakukan penyidikan, penyadapan, serta operasi tangkap tangan (OTT). Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari tantangan seperti intervensi politik, yang kerap menurunkan independensi KPK. Sementara itu, kegagalan dalam beberapa kasus besar yang mandek di pengadilan, serta penurunan jumlah OTT, menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti lemahnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain dan pengaruh politik masih menjadi penghambat. Analisis mendalam seharusnya menggali lebih dalam dinamika politik, hukum, dan sosial yang memperlambat atau bahkan menghambat penindakan korupsi, sehingga solusi yang diusulkan dapat lebih strategis dan efektif.

Intervensi politik menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi KPK. KPK tidak luput dari intervensi politik, baik internal maupun eksternal. Hal ini dapat memengaruhi independensi dan kredibilitas KPK dalam menjalankan tugasnya. Meski begitu, KPK masih memiliki banyak kekuatan dalam penindakan kasus-kasus korupsi di sektor publik. Kewenangan yang luas menjadi salah satu keunggulan KPK. KPK memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan penahanan. Sumber daya yang memadai juga mendukung kinerja KPK. KPK memiliki dana dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Dukungan masyarakat juga menjadi kekuatan utama KPK. KPK mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi.(Suyatmiko et al., 2020)

Untuk meningkatkan efektivitas KPK dalam penindakan kasus-kasus korupsi di sektor publik, perlu dilakukan beberapa langkah. Memperkuat koordinasi dengan

lembaga lain menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. KPK perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung, Dalam memerangi korupsi, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal yang penting. KPK harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya. Mempublikasikan informasi tentang penanganan kasus korupsi dan terbuka untuk saran dan kritik dari orang lain. Memperkuat edukasi dan pencegahan korupsi juga penting dilakukan. KPK perlu memperkuat edukasi dan pencegahan korupsi di berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintahan, dan sektor swasta.(Febrio et al., 2024)

KPK merupakan institusi yang berperan penting dalam memerangi korupsi di Indonesia. Meskipun ada beberapa kelemahan, KPK telah menunjukkan kinerja yang gemilang dalam menindak para koruptor dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan terus meningkatkan efektivitasnya, KPK diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki korupsi, Komisi Anti Korupsi (KPK) telah berperan sebagai lembaga yang efektif dalam menghentikan dan mencegah tindakan korupsi di sektor publik. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pemerintah. Berikut adalah beberapa contoh efektivitas KPK dalam penindakan kasus-kasus korupsi di sektor publik.(Zahra et al., 2023)

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap pejabat publik dan pemerintah. Dalam beberapa kasus, KPK telah menemukan dan menghentikan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pemerintah; KPK juga memiliki otoritas untuk menyelidiki dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut. KPK telah menemukan dan menghentikan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pemerintah. Mereka juga dapat berkolaborasi dan mengawasi lembaga lain yang bekerja untuk memerangi korupsi. Dalam beberapa kasus, KPK telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk menghentikan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan publik.(Angkat & Koto, 2024)

Selain itu, KPK memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pendidikan dan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dalam beberapa kasus, KPK telah melakukan kampanye anti-korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memerangi korupsi. KPK juga memiliki kewenangan untuk melaporkan dan menghukum korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pemerintah. Dalam beberapa kasus, KPK telah melakukan laporan dan akuntabilitas terhadap korupsi dari pihak berwenang dan pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah menangani sejumlah kasus korupsi, termasuk pejabat publik dan pemerintah. Berikut adalah beberapa contoh efektivitas KPK dalam penindakan kasus-kasus korupsi di sektor publik. Misalnya, kasus korupsi di Kementerian Keuangan, di mana KPK telah menangani kasus



korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pemerintah. Dalam kasus ini, KPK telah melakukan penyidikan dan penindakan terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan publik. Demikian pula, kasus korupsi di Kementerian Pendidikan, di mana KPK telah menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pemerintah. Dalam kasus ini, KPK telah melakukan penyidikan dan penindakan terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan publik. Kasus korupsi di Kementerian Kesehatan juga menjadi contoh lain efektivitas KPK. Dalam kasus ini, KPK telah menangani korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pemerintah, melakukan penyidikan dan penindakan terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan publik. (Firdaus et al., 2021)

Secara keseluruhan, KPK telah menunjukkan kinerja yang baik dalam penindakan kasus-kasus korupsi di sektor publik. Meskipun masih ada beberapa tantangan dan kritik yang harus diatasi, KPK terus berupaya untuk meningkatkan efektivitasnya dalam memberantas korupsi. Dengan memperkuat koordinasi dengan lembaga lain, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat edukasi dan pencegahan korupsi, KPK diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Dukungan masyarakat terhadap KPK juga sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK perlu terus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan melibatkan mereka dalam upaya pemberantasan korupsi. (F. Pahlevi, 2022)

Dalam beberapa tahun ke depan, KPK diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan menjadi organisasi yang lebih baik dalam memerangi korupsi di sektor publik. Dengan dukungan masyarakat dan komitmen yang kuat dari pemerintah, KPK dapat berperan lebih besar dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi akan sangat bergantung pada upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Dengan kerja sama yang baik dan komitmen yang kuat, kita dapat berharap bahwa Indonesia akan lebih bersih dan bebas dari korupsi. (Putri, 2024)

### **Upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan oleh KPK dalam mengurangi korupsi di sektor publik**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan edukasi untuk mengurangi korupsi di sektor publik di Indonesia. Selain penindakan, yang sering kali menjadi fokus perhatian publik, KPK juga berupaya keras melalui berbagai program preventif dan edukatif. Usaha-usaha ini dijalankan dengan banyak cara yang berguna dan strategis. Salah satu langkah yang sangat penting KPK dalam pencegahan korupsi adalah penguatan sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ). KPK mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam PBJ dengan menyusun regulasi dan pedoman, termasuk penerapan e-Procurement dan tanggung jawab yang terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin proses pengadaan yang adil dan

transparan, sehingga meminimalisir peluang terjadinya korupsi. (Hendarto & Sulisty, 2023)

Selain itu, KPK juga memberikan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui pelatihan dan sosialisasi, ASN diajarkan tentang pentingnya antikorupsi, kode etik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembinaan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memperkuat integritas ASN dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, penguatan kelembagaan juga menjadi fokus KPK. Lembaga-lembaga publik dibantu dalam membangun sistem pencegahan korupsi internal, seperti pembentukan Unit Pemberantasan Korupsi (UPK) dan pengembangan Whistleblowing System, yang memungkinkan pelaporan anonim atas tindakan korupsi. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan korupsi di berbagai sektor juga merupakan bagian integral dari strategi KPK. Dengan melakukan pemantauan dan penilaian secara rutin, KPK dapat memastikan bahwa program pencegahan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diharapkan. (Purniawati et al., n.d.)

Selain pencegahan, KPK juga aktif dalam edukasi masyarakat mengenai bahaya korupsi. Kampanye antikorupsi gencar dilakukan melalui berbagai media, seperti iklan layanan masyarakat, seminar, dan workshop. Kampanye ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang efek buruk korupsi dan pentingnya melawan praktik koruptif. Selain itu, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi dilakukan untuk memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan antikorupsi yang dimulai sejak dini diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih berintegritas dan memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya korupsi. (Angkat & Koto, 2024)

KPK juga memiliki program khusus untuk menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda, seperti Jaga KPK dan Anti-Corruption Youth Camp. Program-program ini dirancang untuk memberdayakan pemuda dengan keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan korupsi. Pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi juga tidak kalah pentingnya. KPK mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai program, seperti Saber Pungli dan Lapor Korupsi. Partisipasi aktif masyarakat diyakini dapat menjadi kekuatan besar dalam memerangi korupsi, karena masyarakatlah yang sering kali menjadi saksi pertama dari tindakan korupsi di lingkungannya. (Suhandi, 2023)

Upaya pencegahan dan edukasi KPK telah menunjukkan beberapa dampak positif yang signifikan. Misalnya, survei menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi semakin meningkat. Selain itu, data KPK juga menunjukkan tren penurunan jumlah kasus korupsi yang ditangani dalam beberapa tahun belakangan ini. Ini membuktikan bahwa langkah-langkah preventif dan edukatif yang dilakukan oleh KPK mulai membuahkan hasil. Namun, meskipun telah menunjukkan dampak positif, upaya pencegahan dan edukasi KPK masih



menghadapi sejumlah masalah, salah satunya adalah budaya korupsi yang masih mengakar kuat di masyarakat. Budaya ini tidak dapat diubah dalam waktu singkat, sehingga diperlukan upaya yang berkelanjutan dan konsisten untuk mengatasinya. (Waluyo, 2022)

Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan juga menjadi hambatan dalam menjalankan program-program pencegahan dan edukasi secara luas. Selain itu, kurangnya koordinasi antar-lembaga sering kali menjadi kendala dalam implementasi upaya pencegahan dan edukasi korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang kuat antar-lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis dalam memerangi korupsi. (Manihuruk et al., 2024)

Dengan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan upaya pencegahan dan edukasi KPK dapat semakin efektif dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan dan edukasi KPK tidak hanya penting, tetapi juga esensial dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui upaya-upaya ini, KPK berusaha membangun budaya antikorupsi yang kuat dan berkelanjutan di tengah masyarakat. (Putri, 2024)

Penting untuk dicatat bahwa upaya pencegahan dan edukasi KPK perlu dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Selain itu, Untuk mencapai tujuan ini, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat penting bagi pemberantasan korupsi. Dengan membangun budaya antikorupsi yang kuat, diharapkan korupsi di sektor publik dapat diminimalisir dan Indonesia dapat berkembang dan sejahtera. KPK terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan edukasi korupsi. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat berharap untuk masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang korupsi yang selama ini merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya upaya pencegahan dan edukasi dalam pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa dilebih-lebihkan. Untuk menciptakan perubahan yang signifikan, KPK terus berinovasi dalam metode dan strategi mereka. Salah satu inovasi terbaru adalah penerapan teknologi digital untuk memperkuat sistem pengawasan dan edukasi antikorupsi. (Muttaqin et al., 2024)

KPK telah mengembangkan berbagai platform digital, termasuk aplikasi mobile dan portal online, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi secara anonim dan aman. Sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memberikan rasa aman bagi para pelapor. Selain itu, penggunaan teknologi ini mempercepat proses investigasi dan penindakan oleh KPK, sehingga dapat segera menindaklanjuti laporan yang masuk. Edukasi antikorupsi juga diperkuat melalui program-program e-learning dan web seminar (webinar). Melalui platform ini, KPK dapat menjangkau lebih banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Dengan modul

pembelajaran yang interaktif dan menarik, KPK berusaha menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat luas. (Baharuddin et al., 2021)

Kampanye antikorupsi yang dilakukan KPK juga semakin kreatif dan inovatif. Misalnya, melalui media sosial, KPK sering kali melibatkan influencer dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan pesan-pesan antikorupsi. Dengan demikian, pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan direspon oleh generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial. Selain itu, kampanye melalui video pendek, infografis, dan meme juga digunakan untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan dengan cara yang lebih ringan namun tetap bermakna. Kerja sama internasional juga menjadi bagian dari strategi KPK dalam memberantas korupsi. KPK sering kali bekerja sama dengan lembaga antikorupsi dari negara lain untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan kapasitas KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks, terutama yang melibatkan jaringan internasional. Melalui kerja sama ini, KPK juga dapat belajar dari praktik-praktik terbaik di negara lain dan mengadopsinya sesuai dengan kondisi di Indonesia. (RUSTIYOWATI, 2020)

Tantangan besar yang dihadapi KPK dalam upaya pencegahan dan edukasi adalah membangun budaya antikorupsi yang kuat. Budaya korupsi yang telah mengakar sulit diubah hanya dengan regulasi dan penindakan. Diperlukan perubahan paradigma dan kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, KPK terus berupaya untuk menggerakkan semua elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan media massa, untuk bersama-sama memerangi korupsi. (Budiman, 2021)

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki KPK juga menjadi tantangan. Dengan jumlah pegawai yang terbatas dan anggaran yang harus dibagi untuk berbagai program, KPK harus bekerja secara efisien dan efektif. Namun, dengan komitmen yang kuat dan dedikasi tinggi dari seluruh stafnya, KPK terus berusaha memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya KPK. Kurangnya koordinasi antar-lembaga juga sering kali menjadi menghalangi pendidikan dan pencegahan korupsi. Akibatnya, KPK berusaha untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain di tingkat nasional dan daerah. Melalui forum-forum koordinasi dan sinergi program, KPK berupaya memastikan bahwa semua pihak bergerak dalam satu irama dan tujuan yang sama dalam memerangi korupsi. (Reza, 2023)

Sebagai bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan edukasi, KPK juga rutin melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini penting untuk menentukan seberapa berhasil program mencapai tujuan mereka dan apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun program-program selanjutnya yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. (Rizky et al., 2023)

Dengan segala upaya dan tantangan yang ada, KPK tetap optimis bahwa Indonesia bisa bebas dari korupsi. Komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan penuh dari masyarakat, dan kerja keras dari seluruh jajaran KPK adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Dengan terus meningkatkan upaya pencegahan dan edukasi, serta memastikan bahwa setiap tindakan korupsi ditindak secara tegas, Indonesia mungkin lebih bersih, adil, dan sejahtera. Dalam penutupnya, penting untuk menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. KPK tidak dapat bekerja sendirian; semua pihak harus terlibat aktif dalam melawan korupsi. Dari lingkup terkecil, seperti keluarga dan sekolah, hingga tingkat nasional, setiap individu memiliki peran penting dalam membangun budaya antikorupsi. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, kita bisa menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi dan lebih baik bagi generasi mendatang. (F. S. Pahlevi, 2022)

## SIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berperan sebagai lembaga yang efektif dalam menghentikan dan mencegah tindakan korupsi di sektor publik. Upaya pencegahan dan edukasi KPK telah menunjukkan beberapa dampak positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan penurunan jumlah kasus korupsi yang ditangani. KPK juga telah mengembangkan berbagai platform digital untuk memperkuat sistem pengawasan dan edukasi antikorupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Namun, KPK masih menghadapi beberapa tantangan, seperti budaya korupsi yang masih mengakar kuat di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, KPK berusaha untuk meningkatkan efektivitasnya dengan memperkuat koordinasi dengan lembaga lain, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat edukasi dan pencegahan korupsi di berbagai sektor. Dalam penutupnya, penting untuk menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. KPK tidak dapat bekerja sendirian; semua pihak harus terlibat aktif dalam melawan korupsi. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, diharapkan KPK dapat terus meningkatkan efektivitasnya dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkat, I. S., & Koto, I. (2024). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1841–1852.
- Baharuddin, T., Salahudin, S., Sairin, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2021). Kampanye Antikorupsi Kaum Muda melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 58–77.

- Budiman, M. (2021). Tatangan Dan Isu Strategis Gerakan Antikorupsi Terkini. *Syntax Idea*, 3(10), 2155–2170.
- Febrio, I., Baihaqi, A. F. C., Handayani, K. F., & Azhara, A. (2024). Indikator Delik Suap dan Gratifikasi. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1), 1–19.
- Firdaus, S. P., Bahar, M. G. F., & Sangadji, B. M. (2021). Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(1), 55–79.
- Guntara, B. (2020). Maraknya korupsi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 11–24.
- Hadji, K., & Patmawati, N. (2024). Optimalisasi Kinerja Hukum Tata Negara Melalui Lembaga KPK Dalam Upaya Mengurangi Angka Korupsi: Analisis Implementasi Strategi Penegakan Hukum Di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 116–128.
- Hendarto, D., & Sulisty, E. (2023). STRATEGI EFEKTIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Wabana Bina Pemerintahan*, 5(2), 38–44.
- Heriyanto, H. (2023). *Problematika Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Manihuruk, J., Sihombing, R., Purba, D., & Richardo, S. (2024). PELATIHAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT: EDUKASI DAN PENCEGAHAN PENYAKIT TROPIS DI DESA BUTTU BAYU PANEI RAJA. *PROFICIO*, 5(2), 526–539.
- Muttaqin, M. F., Sari, I., & Wahyudi, A. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi*. AMERTA MEDIA.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1).
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhshiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44.
- Pringgaskati, P. P., & Zulfiani, A. (n.d.). *Dampak Kasus BLBI terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*.
- Purniawati, I., Apriyana, D., Salamony, J. W., Damar, K., & Parikesit, M. R. C. (n.d.). *PENGALIHAN STATUS PEGAWAI DILINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI*.
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Reza, M. F. (2023). *Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Antifraud Inspektorat Kabupaten Sleman*. Universitas Islam Indonesia.
- Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan dan Langkah-Langkah Konkret. *Jurnal Manubara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1(4), 407–419.
- RUSTIYOWATI, O. G. I. (2020). *GERAKAN SOSIAL ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN (STUDI KASUS: KOMUNITAS FUTURE LEADER FOR ANTI CORRUPTION)*. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- Siagian, F. S. (2023). Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory in the Authority to Investigate Corruption Crimes in Indonesia. *JUSTICES: Journal*

- of Law*, 2(4), 185–201.
- Sudiantini, D. (2020). *Leaders and Culture-Bagaimana Strategi Meningkatkan Kinerja Layanan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Suhandi, M. F. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 19–27.
- Suyatmiko, W., Nicola, A., & Fajrin, N. (2020). *Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu bagian dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan mas*.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Zahra, M. R., Permana, K. N., Naufal, Y. A., & Wibowo, S. P. A. (2023). Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 104–118.